

LAMPIRAN XLIII  
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 34 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2025 -2029

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. LATAR BELAKANG**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa berdasarkan pasal 109 perangkat daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) bersamaan dengan penyusunan RPJMD, sehingga perlu disusun surat edaran kepala daerah tentang penyusunan rancangan Renstra PD sebagaimana pasal 57.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029. Penyusunan nomenklatur dalam RPJMD berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomenklatur tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah Kepmendagri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025. Kepmendagri ini merupakan perubahan ketiga dari Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 telah disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2025. Sebagai dokumen perencanaan daerah yang berlaku lima tahun tersebut selanjutnya harus diterjemahkan dalam perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan periode menyesuaikan periode RPJMD. Renstra PD harus mampu menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan jangka menengah dalam RPJMD ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi PD. Untuk menjamin terwujudnya sinkronisasi dan konsistensi antar RPJMD dengan Renstra PD perlu disusun pedoman

penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Girisubo Tahun 2025-2029 pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029.

Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Kapanewon Girisubo, maka disusunlah Perubahan Renstra Kapanewon Girisubo sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Sejalan dengan hal itu pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) wajib bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategik yang ditentukan oleh PD yang bersangkutan.

Selanjutnya sebagai implementasinya, penyusunan Perubahan Rencana Strategis instansi harus dibuat dengan kaidah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Renstra Kapanewon Girisubo memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan.

Hubungan Rencana Strategis Kapanewon dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

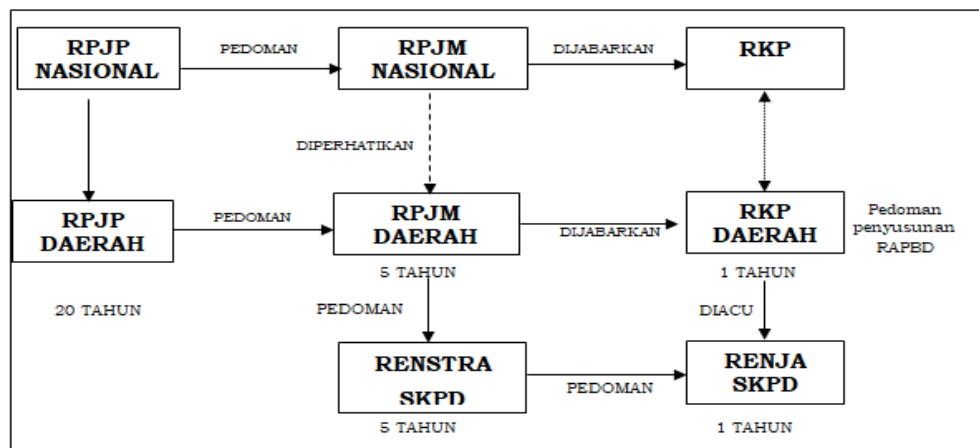
1. Hubungan Rencana Strategis dengan RPJM Daerah adalah bahwa RPJM merupakan kerangka acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang didalamnya memuat penjabaran teknis operasional berupa visi, misi, kebijakan teknis dan indikasi rencana program dalam jangka waktu 5 tahunan;
2. Hubungan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan RKA PD adalah bahwa RKA merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah ditinjau dari aspek pembiayaan/pendanaan yang disusun setiap tahunnya;
3. Hubungan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Dokumen Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kapanewon adalah bahwa Rencana Strategis menjadi acuan atau panduan dalam evaluasi program, pemantapan dan penyusunan rencana pembangunan tahunan Kapanewon;
4. Hubungan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah adalah bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis harus memperhatikan aspek penataan ruang dari wilayah sehingga tidak terjadi konflik kepentingan diantara masing-masing bidang pembangunan maupun dari pelaku pembangunan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang

mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan ( Pasal 2 Ayat 2 ), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Gambar 1.1

Kaitan RENSTRA PD dengan Dokumen Perencanaan Lain



Menurut Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral perencanaan pembangunan Nasional. Konsekuensi logisnya adalah bahwa dokumen perencanaan pembangunan di bawah harus mengacu dokumen perencanaan di atasnya. Hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyempurnaan sistem Perencanaan dan Penganggaran Nasional, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah.

Oleh karena itu pada penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul, juga dilakukan sinkronisasi dengan tema dan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sedangkan setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Sedangkan regulasi teknis terkait kebijakan kementerian sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah antara lain :

1. Reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara, dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha;
2. Peningkatan kesejahteraan rakyat yang semakin merata dan berkeadilan melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan dan

- kesehatan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan, percepatan penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran, mitigasi dan pencegahan bencana, dan peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya;
3. Berlakunya perdagangan bebas pada wilayah ASEAN (kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN - MEA) yang diharapkan menumbuhkan tingkat konsumsi dan produksi pada wilayah DIY umumnya dan Kabupaten Gunungkidul pada khususnya yang mengedepankan pertumbuhan wisata dan budaya serta memantapkan perekonomian daerah melalui peningkatan daya saing, peningkatan ketahanan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
  4. Mempertahankan momentum pertumbuhan dan perkembangan pariwisata Gunungkidul agar dapat dikelola secara lebih profesional dan mampu bersaing menjadi daerah tujuan wisata terkemuka yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan (*length of stay*) di Gunungkidul. Masih banyak obyek dan daya tarik wisata potensial di Gunungkidul termasuk potensi Geopark untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan;
  5. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis daerah melalui percepatan ketersediaan lahan pembangunan untuk kepentingan umum, meningkatkan fasilitasi kerjasama pemerintah dengan pemerintah, serta pemerintah-swasta dan meningkatkan infrastruktur publik terutama di wilayah tertinggal dan perbatasan;
  6. Mewujudkan orientasi pembangunan “Among Tani Dagang Layar” yaitu Menjadikan Laut sebagai Halaman Muka dan bidang pertanian sebagai tulang punggung (*back bone*) pembangunan sekaligus dalam rangka mengisi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
  7. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan.

## **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Landasan hukum yang dipakai dalam penyusunan Rencana Setrategis Kapanewon GiriSubo adalah:

1. Undang-undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 116);
15. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 24 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
16. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2024 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2029;

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah :

1. Maksud :

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis PD dimaksudkan, untuk :

- a. Sebagai wujud komitmen Kapanewon Girisubo terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJM Daerah.
- b. Memberikan arah dan pedoman bagi semua pegawai Kapanewon Girisubo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai.
- c. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain, melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.
- d. Sebagai gambaran yang akan dicapai Kapanewon Girisubo dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan.

2. Tujuan :

- a. Memberikan gambaran tentang kondisi umum Kapanewon Girisubo saat ini dan untuk lima tahun ke depan.
- b. Sebagai acuan dalam penyusunan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.
- c. Sebagai pedoman dalam bekerja dan menilai arah kebijakan program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.
- d. sebagai salah satu instrumen/alat pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Girisubo disusun dengan Sistematika penulisan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KAPANEWON GIRISUBO**

- 2.1. Gambaran Pelayanan Kapanewon Girisubo
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kapanewon Girisubo

- BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- 3.1. Tujuan Dan Sasaran Renstra Kapanewon Girisubo Tahun 2025-2029
  - 3.2. Strategi Kapanewon Girisubo dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
  - 3.4. Arah Kebijakan Kapanewon Girisubo dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Girisubo Tahun 2025-2029
- BAB IV : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB V : PENUTUP

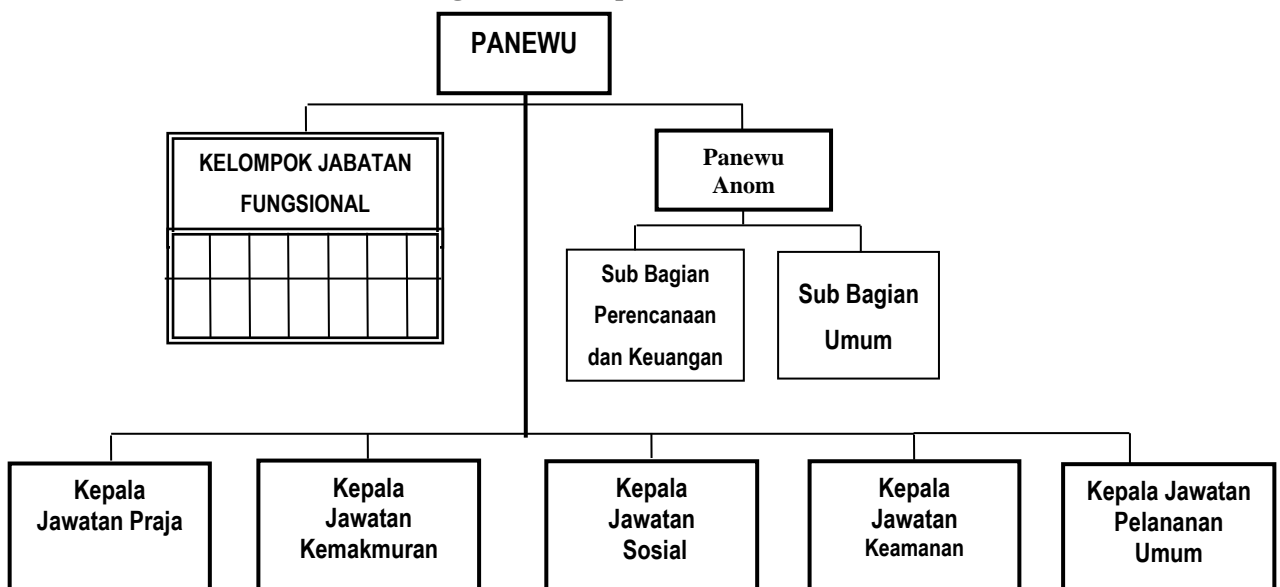
**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**  
**KAPANEWON GIRISUBO**

**2.1. Gambaran Pelayanan Kapanewon Girisubo**

**2.1.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Kapanewon Girisubo**

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kapanewon. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Kapanewon Girisubo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1  
 Bagan Struktur  
 Struktur Organisasi Kapanewon Girisubo



*Sumber : Lampiran Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023*

Kapanewon Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;



- c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan sarana pelayanan umum;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah Kapanewon;
- i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
- j. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
- k. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
- l. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- m. Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- n. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

### **2.1.2. Sumber Daya Kapanewon Girisubo**

Sebagai suatu lembaga yang bertugas untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 243/KPTS/2024 tentang Hasil Analisis Jabatan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diketahui bahwa kebutuhan pegawai untuk Kapanewon berjumlah 47 orang.

Data pegawai dirinci Data pegawai Kapanewon Girisubo dirinci menurut tingkat pendidikannya sampai 31 Agustus 2025 sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi**

No	Jabatan	Pegawai yang ada					Jenis Kelamin		
		Jml	Kualifikasi					Laki-laki	Perempuan
			S2	S1	D3	SMA	SMP		
1	Unsur Pimpinan								
	Panewu	1	1				1		
2	Unsur Pembantu Pimpinan								
	Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian	1		1			1		
3	Unsur Pelaksana								
	Jawatan-jawatan;	4		4			4		
4	Kelompok Jabatan Fungsional								
5	Staf	12	1	2	2	7	7	5	
	Jumlah	18	2	7	2	7	13	5	

Berdasarkan data pada tabel 2.2, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan.

**Tabel 2.3**  
**Komposisi PNS Kapanewon Girisubo**  
**Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jabatan**

No	Nama	Gol	Jabatan Dalam Dinas
1.	Edy Sedono, SIP, M.Si.	IV/b	Panewu
2.	Kunto Winarno, SE	III/d	Plt. Panewu Anom dan Kepala Jawatan Keamanan
3.	Karyanto, S.IP.	III/d	Plt. Jawatan Praja dan Kepala Jawatan Pelayanan Umum
4.	Y.Trimurjaka, S.IP	III/c	Kepala Jawatan Kemakmuran
5.	Giyatno, S.IP	III/c	Kepala Jawatan Sosial
6.	Suyono, S.IP	III/c	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan
7.	Utari Nur Safitri,S.Sos.	III/b	Staf Jawatan Kemakmuran
8.	Iksan Mustofa,SH	III/a	Staf Pelayanan Umum
9.	Supardi	II/b	Staf Jawatan Kemakmuran
10.	Widodo	II/b	Staf Subbag Umum
11.	Maryatun	II/a	Staf Subbag Umum
12.	Kendri Ariyanto, A.Md	VII	Staf Subbag Umum
13.	Nurhayati	V	Staf Jawatan Praja
14.	Ari Sugiyarto	V	Staf Jawatan Keamanan

Sarana dan prasarana perkantoran merupakan faktor pendukung kinerja organisasi, adapun kondisi sarana prasarana yang ada di Kapanewon Girisubo secara lengkap dalam tabel berikut:

Tabel 2.4  
Sarana prasarana di Kapanewon Girisubo

no	Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Nama Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
1	1	3			ASET TETAP	415	4.382.983.641,93
			1		TANAH	1	40.000.000,00
			1	1	TANAH	1	40.000.000,00
			2		PERALATAN DAN MESIN	370	813.639.947,28
			2	1	ALAT BESAR	1	2.500.000,00
			2	2	ALAT ANGKUTAN	8	297.748.636,00
			2	3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	0	0
			2	4	ALAT PERTANIAN	0	0
			2	5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	316	326.288.846,28
			2	6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	12	31.071.666,00
			2	7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	1	485.000,00
			2	8	ALAT LABORATORIUM	1	784.000,00
			2	9	ALAT PERSENJATAAN	0	0
			2	10	KOMPUTER	31	154.761.799,00
			2	11	ALAT EKSPLORASI	0	0
			2	12	ALAT PENGEBORAN	0	0
			2	13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0
			2	14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0	0
			2	15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0	0
			2	16	ALAT PERAGA	0	0
			2	17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0
			2	18	RAMBU – RAMBU	0	0
			2	19	PERALATAN OLAH RAGA	0	0
			3		GEDUNG DAN BANGUNAN	12	3.493.237.694,65
			3	1	BANGUNAN GEDUNG	9	3.290.280.494,65
			3	2	MONUMEN	0	0
			3	3	BANGUNAN MENARA	0	0
			3	4	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	3	202.957.200,00
			4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	2	21.123.000,00
			4	1	JALAN DAN JEMBATAN	0	0
			4	2	BANGUNAN AIR	1	12.853.000,00
			4	3	INSTALASI	0	0
			4	4	JARINGAN	1	8.270.000,00

no	Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Nama Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
			5		ASET TETAP LAINNYA	30	14.983.000,00
			5	1	BAHAN PERPUSTAKAAN	0	0
			5	2	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	30	14.983.000,00
			5	3	HEWAN	0	0
			5	4	BIOTA PERAIRAN	0	0
			5	5	TANAMAN	0	0
			5	6	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0
			5	7	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0	0
			6		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0
			6	1	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0
			7		AKUMULASI PENYUSUTAN	0	0
			7	1	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	0	0
			7	2	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	0	0
			7	3	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	0	0
			7	4	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	0	0
2	1	5			ASET LAINNYA	109	66.220.200,00
			2		KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0
			2	1	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0
			3		ASET TIDAK BERWUJUD	0	0
			3	1	ASET TIDAK BERWUJUD	0	0
			4		ASET LAIN-LAIN	109	66.220.200,00
			4	1	ASET LAIN-LAIN	109	66.220.200,00
			5		AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	0	0
			5	1	AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	0	0
			6		AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	0	0
			6	1	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET	0	0

no	Aku n	Kel om po k	Jenis	Objek	Nama Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
					LAINNYA		
					TOTAL	524	4.449.203.841,93

### 2.1.3. Kinerja Pelayanan Kapanewon Girisubo

Kinerja pelayanan Kapanewon Girisubo dapat dilihat melalui salah satu tolok ukur yakni kinerja organisasi tersebut. Kinerja organisasi dapat dilihat dengan cara membandingkan antara rencana kerja dengan evaluasi pelaksanaan program kerja.

Berkenaan dengan hal ketugasan dan fungsi kapanewon pada tahun 2025, berikut adalah daftar program kerja yang telah dilaksanakan di Kapanewon Girisubo berdasarkan sumber pembiayaan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- e. Program peningkatan kualitas Pelayan Publik;
- f. Program peningkatan kualitas Perencanaan;
- g. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial kemasyarakatan;
- h. Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban, dan Kenyamanan Lingkungan;
- i. Program peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- j. Program Peningkatan partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;

Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan selama tahun 2025 berdasarkan materi sebagaimana tercantun dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kapanewon antara lain :

- a. Panewu Anom
  1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional;
  3. Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
  4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  5. Penyediaan barang Cetak dan penggandaan;
  6. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor;
  7. Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor;

8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan;
  10. Penyediaan makanan dan minuman;
  11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
  12. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran;
  13. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
  14. Pengadaan Mebeler;
  15. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor;
  16. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/operasional;
  17. Penatalaksanaan Kepegawaian Perangkat Daerah;
  18. Pengembangan Kapasitas Aparatur
  19. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD;
  20. Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran;
  21. Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
  22. Penyusunan pelaporan Keuangan Bulanan/SPJ;
  23. Pengelolaan data dan Informasi PD;
  24. Penyusunan IKM;
  25. Pengendalian Internal SKPD;
  26. Monev Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  27. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kapanewon (Paten);
  28. Penyusunan dan Evaluasi Renstra SKPD;
  29. Penyusunan dan Evaluasi rencana Kerja SKPD;
  30. Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program Kegiatan SKPD;
- b. Jawatan Sosial
1. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pembinaan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
  2. Koordinasi dan Pendampingan Upaya Kesehatan masyarakat, Perorangan dan Keluarga Berencana;
  3. Pengangan dan penanggulangan Bencana;
  4. Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal;
  5. Koordinasi dan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan YME;
  6. Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Perempuan;
  7. Koordinasi dan Pembinaan Olah raga, Pemuda dan karang Taruna;
  8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Jawatan Keamanan
1. Pembinaan dan Koordinasi Keamanan Ketertiban Masyarakat dan patroli terpadu Muspika;
  2. Pembinaan, Koordinasi dan Monitoring Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
  3. Koordinasi, Mitigasi, Pencegahan Bencana dan Penanganan Korban Bencana Alam;
  4. Penyelenggaraan peningkatan kinerja Paskibraka Kapanewon;

5. Pembinaan dan Koordinasi pencegahan Penyakit Masyarakat (Pekat);
- d. Jawatan Praja
1. Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Kalurahan, Produk Hukum Kalurahan dan Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
  2. Pembinaan dan koordinasi pengisian Lurah dan Pamong Kalurahan, serta penguatan kapasitas Lurah, Pamong Kalurahan dan kelembagaan Kalurahan;
  3. Koordinasi dan Pendampingan penataan administrasi Pertanahan dan tanah Kas Kalurahan;
  4. Koordinasi dan Pendampingan kerja sama antar Kalurahan;
  5. Koordinasi dan Pendampingan penyusunan Monografi Kalurahan dan Kapanewon;
  6. Koordinasi pemanfaatan tata ruang wilayah;
- e. Jawatan Kemakmuran
1. Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kalurahan dan Kapanewon;
  2. Pembinaan dan Koordinasi Evaluasi pembangunan Kalurahan;
  3. Pembinaan dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan pelestarian aset aset program pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
  4. Koordinasi dan Pendampingan Penyusunan Profil Kalurahan dan Profil Kapanewon;
  5. Koordinasi pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Kalurahan dan Kegiatan Ekonomi masyarakat Kalurahan;
  6. Koordinasi dan Pendampingan Ekspose/Pameran Kerajinan dan Industri Rumah Tangga lainnya;
  7. Monitoirng ,Evaluasi dan Pelaporan;

Dalam rangka memperbaiki kinerja Perangkat Daerah Kapanewon Girisubo, diperlukan kesepahaman mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan menjadi kewenangan kapanewon. Hal ini telah diawali dengan membuat standarisasi program dan kegiatan untuk Perangkat Daerah kapanewon. Langkah selanjutnya yang perlu ditempuh adalah dengan mereview Renstra Kapanewon, dan melakukan penyesuaian terhadap program-program dan kegiatan-kegiatannya beserta target-target kinerjanya. Dengan langkah ini diharapkan akan mampu mengurangi kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam Renstra. Namun demikian, tentunya perlu diperhatikan pula urgensi pencapaian target kinerja RPJMD yang dibebankan kepada Perangkat Daerah Kapanewon.

Secara garis besar evaluasi atas capaian kinerja program/kegiatan Kapanewon Girisubo tahun 2024 mengacu pada APBD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Kelompok program *pertama*, semua urusan : berkaitan dengan penyelenggaraan urusan bidang pemerintahan yang meliputi program sebagai berikut :
  - 1.1. Program pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan, antara lain :

Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik, penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan alat tulis, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, -rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran. Keseluruhan kegiatan dapat terselenggara sebagaimana mestinya.
  - 1.2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari 4 (empat) kegiatan, antara lain :

Penyediaan perlengkapan gedung kantor, pengadaan mebelair, pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional. Seluruh kegiatan juga berjalan sesuai dengan harapan.
  - 1.3. Program Peningkatan disiplin aparatur.

Terdiri dari 1 (satu ) kegiatan, yaitu Fasilitasi administrasi kepegawaian SKPD.
  - 1.4. Program peningkatan, pengembangan sistem laporan capaian kinerja keuangan, yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yaitu :

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD ( menyusun dokumen LAKIP), Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ. Pencapaian program ini tertib dokumentasi keuangan dilihat dengan terkelolanya administrasi keuangan. Ketepatan waktu dalam pengiriman pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja kapanewon yang keduanya harus dikirim ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, telah menunjukkan peningkatan yang sangat baik.
  - 1.5. Program Peningkatan kualitas pelayanan publik, terdiri dari 5 (lima ) kegiatan, yaitu :

Pengolahan data dan sistem informasi SKPD, Penyusunan IKM, pengendalian internal SKPD, Monev penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Fasilitasi Pelayanan



publik terpadu. Kegiatan pelayanan (Paten) antara lain adalah kegiatan persuratan yang rata-rata dalam sehari melayani 15 - 20 buah KTP, 15 - 20 buah KK, 20 surat-surat lain ( pindah tempat, SKCK, Ijin Usaha dan lain lain ) dengan pelayanan selesai saat atau kurang dari dua hari. Kendala dalam peningkatan kualitas pelayanan KTP dan KK adalah jaringan internet yang kurang lancar, sementara untuk entry data kependudukan telah menggunakan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan bila terjadi gangguan jaringan internet akan menghambat pelayanan KTP dan KK.

- 1.6. Program peningkatan Kualitas Perencanaan, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

Penyusunan Renstra, Penyusunan Renja, dan Monev dan pengendalian program kegiatan SKPD. Pencapaian program peningkatan kualitas perencanaan secara keseluruhan meliputi tertib dokumentasi perencanaan, pengorganisasian, keuangan dilihat dengan 2 indikator yaitu tersusunnya dokumen perencanaan, program kerja dan pelaporan/evaluasi dapat dilaksanakan dengan benar dan akuntabel.

Secara keseluruhan capaian keluaran program dari kelompok program ini rata-rata berhasil baik. Meskipun demikian banyak hal yang masih perlu ditingkatkan dalam hal pelayanan publik untuk mencapai target kepuasan masyarakat yang optimal. Apa yang telah dicapai pada tahun 2024 menjadi standar kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Kapanewon Girisubo benar-benar mampu berada terdepan dalam pelayanan publik.

2. Kelompok program *kedua* berkaitan dengan Urusan Wajib, yang, yaitu :

- 2.1. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan, yang terdiri dari 8 (delapan) kegiatan, yaitu : Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Upaya Kesehatan Masyarakat dan usaha Kesehatan Perorangan dan Keluarga Berencana, Penanganan dan Penanggulangan Kekeringan, Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi pengembangan dan pelestarian budaya lokal, Pembinaan, Koordinasi dan Faasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan kepada Tuhan YME, Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi keorganisasian Perempuan, Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Olahraga, Pemuda dan Karang Taruna, Monitoring, evaluasi dan Pelaporan.

- 2.2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban dan kenyamanan Lingkungan, yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu : Pembinaan dan Koordinasi keamanan ketertiban masyarakat dan Patroli terpadu Muspika, Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan dan kenyamanan lingkungan, Koordinasi, Mitigasi dan pencegahan Bencana alam serta fasilitasi penanganan korban Bencana Alam, Koordinasi, Fasilitasi dan Pembentukan Paskibraka, Fasilitasi dan koordinasi pencegahan PEKAT.

Secara umum capaian program dari kelompok program ini cukup berhasil, hal ini juga didukung dengan adanya partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing.

- 2.3. Program peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Kapanewon dan Kalurahan, yang terdiri dari 6 (enam ) kegiatan, yaitu : Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Kalurahan dan produk hukum Kalurahan dan Pengelolaan keuangan Kalurahan, Fasilitasi dan koordinasi Pengisian Pamong Kalurahan dan Lurah serta Penguatan Kapasitas Lurah, Koordinasi dan Fasilitasi tata administrasi pertanahan dan Tanah Kas Kalurahan, Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kerjasama antar Kalurahan, Penyusunan data monografi daerah dan administrasi perkotaan, Fasilitasi dan Koordinasi Pemanfaatan tata ruang wilayah.

- 2.4. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kalurahan, yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, yaitu : Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Kalurahan dan Kapanewon, Pembinaan, koordinasi dan Evaluasi pembangunan Kalurahan, Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, Fasilitasi dan koordinasi Pendataan profil Kalurahan dan Profil Kapanewon, Fasilitasi dan koordinasi Pengembangan Lembaga keuangan Mikro Kalurahan dan ekonomi masyarakat Kalurahan, Fasilitasi dan koordinasi ekspose/Pameran kerajinan dan industri rumah tangga, Monitoring, evaluasi dan Pelaporan.

Penyelenggaraan urusan bidang pembangunan yang meliputi program sebagai berikut: Penyelenggaraan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan di Kapanewon Girisubo berjalan dengan baik. Diawali dengan proses penyelenggaraan musrenbang di tingkat Kalurahan dan kapanewon yang terlaksana sesuai waktu yang dijadwalkan. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan sudah diupayakan seoptimal mungkin, mewakili unsur-unsur yang ada di masyarakat. Namun demikian, keterwakilan perempuan

dan terutama pemuda masih belum optimal dalam forum musrenbang. Selain itu kualitas usulan dalam forum musyawarah perencanaan masih kurang mengeksplorasi bidang-bidang non fisik. Bidang fisik mencapai 80% dari anggaran, sehingga *mindset* peserta musrenbang perlu diubah agar usulan dalam musrenbang lebih bisa mewakili kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Secara umum pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan adalah baik. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan munculnya kreativitas dan inovasi masyarakat dalam menciptakan lapangan usaha menjadi kunci dari percepatan pembangunan di wilayah Kapanewon Girisubo.

Berkaitan dengan penyelenggaraan urusan bidang kemasyarakatan yang meliputi program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kalurahan meliputi kegiatan gotong royong sebanyak 1 kali/minggu dilaksanakan dimasing-masing padukuhan, pemberdayaan ekonomi produktif 6 kali, mengikuti pameran potensi daerah 2 kali, dan pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan.

Program dan Kegiatan yang termuat dalam Renja tahun 2025 belum seluruhnya dapat dilaksanakan mengingat masih dipertengahan tahun anggaran dan keterbatasan SDM serta adanya penyesuaian nomer rekening. Program kegiatan Perangkat Daerah Kapanewon Girisubo secara keseluruhan telah terakomodir dalam DPA 2025, sedangkan apabila terdapat kegiatan yang ada di Renja yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak terakomodir di DPA tersebut diusulkan kembali melalui Perubahan DPA atau pada Renja Tahun 2026, sedangkan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2025.

Sebagai Perangkat Daerah (PD), Kapanewon Girisubo Sebelumnya telah menyusun Renstra yang pertama yaitu Renstra Kapanewon Girisubo Tahun 2006-2010. Namun demikian, karena penyusunan Renstra pada waktu itu masih merupakan hal baru, dan belum adanya pedoman baku, sehingga masih banyak kelemahan. Seiring dengan diberlakukannya aturan dan pedoman-pedoman yang baru, Renstra tersebut semakin jauh dari pedoman. Program dan kegiatan yang dilaksanakan juga banyak yang kurang sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kinerja Pelayanan Kapanewon Girisubo berdasarkan Renstra Kapanewon Girisubo 2022-2026, dapat dilihat dari Tabel di bawah ini :

Tabel 2.5  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Girisubo  
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Pelayanan Kapanewon	-	-	-	95,01	95,01	95,01	95,01	95,01
2	Nilai AKIP PD	-	-	-	80,06	80,07	80,08	80,09	80,10
3	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	-	-	-	10	10	10	10	10

#### 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Kapanewon Girisubo

Pelayanan dalam dilihat dari kegiatan yang telah dilakukan oleh Kapanewon Girisubo, dapat dibedakan dalam dua macam pelayanan. Macam-macam pelayanan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Girisubo dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu pelayanan dalam arti pelayanan masyarakat yang berupa pelayanan perijinan, legalisasi, dispensasi dan sebagainya. Sedangkan macam pelayanan yang lain merupakan pelayanan dalam arti tugas dan fungsi Kapanewon itu sendiri sebagai Perangkat Daerah.

Kelompok sasaran layanan pada kapanewon Girisubo adalah Masyarakat dan Pamong kalurahan yang menjadi penerima utama berbagai bentuk pelayanan pemerintahan. Masyarakat sebagai pengguna layanan publik mendapat akses terhadap pelayanan administrasi, sosial, dan pemberdayaan, sedangkan perangkat kalurahan memperoleh pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa/kalurahan. Melalui pendekatan ini, kapanewon berperan sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat dan pemerintah kalurahan, guna mewujudkan pelayanan yang efektif, responsif, dan merata.

#### 2.1.5. Mitra Kapanewon Girisubo Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan administrasi kependudukan di wilayah. Kapanewon berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten dalam menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan yang diberikan oleh operator dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi teknis yang memproses dan menerbitkan dokumen tersebut yang di tempatkan atau ditugaskan pada lingkup ruang pelayanan di Kapanewon Girisubo. Kerja sama ini mendorong terciptanya pelayanan yang lebih cepat, terkoordinasi, dan mudah diakses oleh masyarakat, serta mendukung tertib administrasi kependudukan secara menyeluruh.

## 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kapanewon Girisubo

### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kapanewon Girisubo

Kapanewon Girisubo merupakan salah satu dari 18 Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul. Dalam rangka mempercepat keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul, Kapanewon Girisubo memiliki tugas pokok, yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam perkembangan dinamis, tugas-tugas yang menjadi beban Kapanewon Girisubo dapat dilaksanakan, namun demikian masih ada permasalahan-permasalahan yang muncul dan merupakan faktor hambatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Berikut permasalahan dan faktor penyebabnya disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

Tabel: 2.6

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Keterbatasan Kewenangan Kapanewon	Tidak optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik	Kewenangan Kapanewon yang terbatas secara regulasi
Kapasitas Aparatur Belum Memadai	Kualitas SDM belum mendukung pelaksanaan tugas pelayanan	Kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur
		Rekrutmen SDM belum berbasis kebutuhan riil dan kompetensi
Sarana dan Prasarana Belum Memadai	Fasilitas pelayanan publik tidak mendukung pelayanan optimal	Keterbatasan pembangunan fasilitas dan infrastruktur
		Kurangnya perencanaan pengadaan berbasis kebutuhan nyata
Tata Kelola Pemerintahan Belum Efektif	Transformasi digital belum berjalan maksimal	Lemahnya komitmen dan koordinasi lintas sektor dalam digitalisasi pelayanan
		Infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai

### 2.2.2 Isu Strategis

Dalam proses perumusan isu strategis Kapanewon, identifikasi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi perangkat daerah menjadi langkah awal yang krusial. Permasalahan-permasalahan seperti keterbatasan kewenangan, kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai, keterbatasan sarana dan prasarana, serta lemahnya tata kelola pemerintahan menjadi dasar dalam merumuskan arah strategis pembangunan Kapanewon ke depan. Permasalahan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan secara langsung memengaruhi

kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan. Oleh karena itu, isu strategis dirumuskan sebagai respons terhadap akar-akar permasalahan tersebut, dengan fokus utama pada upaya optimalisasi penyelenggaraan pelayanan Kapanewon. Rumusan ini bertujuan untuk mendorong perbaikan sistem, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan tata kelola berbasis transformasi digital yang adaptif terhadap dinamika pembangunan baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Tabel: 2.7  
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kapanewon Girisubo

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon	Kewenangan Kapanewon yang terbatas	Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik	Good Governance	Dinamika Regulasi	Reformasi Kalurahan	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon
	Kapasitas SDM kurang memadai					
	Prasarana dan Sarana Kapanewon kurang memadai					

**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**3.1. Tujuan Renstra Kapanewon Girisubo Tahun 2025-2029**

Visi dan Misi Kapanewon Girisubo adalah sama dengan Visi dan Misi dari Bupati dan Wakil Bupati serta dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangannya.

Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"

Adapun penjelasan Visi adalah sebagai berikut :

a. Masyarakat Adil Makmur,

Adil Makmur bermakna masyarakat yang terpenuhi kebutuhan material maupun spiritual, yang berdaya saing dan inovatif. Masyarakat Gunungkidul sebagai subyek pembangunan yang mempunyai hak ikut dalam merencanakan dan melaksanakan, serta menikmati hasil pembangunan. Kesejahteraan secara inklusif pada semua aspek kehidupan. Semua warga Gunungkidul berkesempatan dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat; melaksanakan hak-hak politik; menjaga keamanan dan ketertiban; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Kabupaten Gunungkidul yang berdaya saing dan inovatif dalam mengelola potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Masyarakat Lestari,

Lestari merupakan perwujudan masyarakat pada khususnya dan Kabupaten Gunungkidul pada umumnya, yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan ramah lingkungan dengan mempertahankan kekhasan bentang alam geologi pegunungan sewu, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, kelestarian sumber daya alam, dan memiliki kehandalan dalam mitigasi bencana.

c. Masyarakat Berkeadaban,

Berkeadaban bermakna masyarakat yang memiliki keimanan, jati diri, teladan, kehormatan, dan kemanusiaan. Keimanan menjadi landasan

moral, sementara jati diri tercermin dalam sikap yang menjunjung nilai budaya dan kearifan lokal. Masyarakat berkeadaban juga merupakan masyarakat bermartabat, yang memiliki harga diri, kehormatan, keadilan, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Setiap individu mendapatkan perlakuan adil dan kesempatan yang setara untuk berkembang. Dengan nilai-nilai tersebut, masyarakat dapat hidup harmonis, maju, dan berdaya saing.

Adapun dari penjabaran visi menjadi 5 misi, Kapanewon Girisubo dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengacu pada misi yang ke-4 yaitu “Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban”.

Tujuan Renstra Kapanewon Girisubo Tahun 2025 – 2029 yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kapanewon Girisubo melalui Renstra yaitu *“Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas”*.

### **3.2. Sasaran Renstra Kapanewon Girisubo Tahun 2025-2029**

Sasaran Renstra Kapanewon girisubo Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Kapanewon.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Perangkat Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.

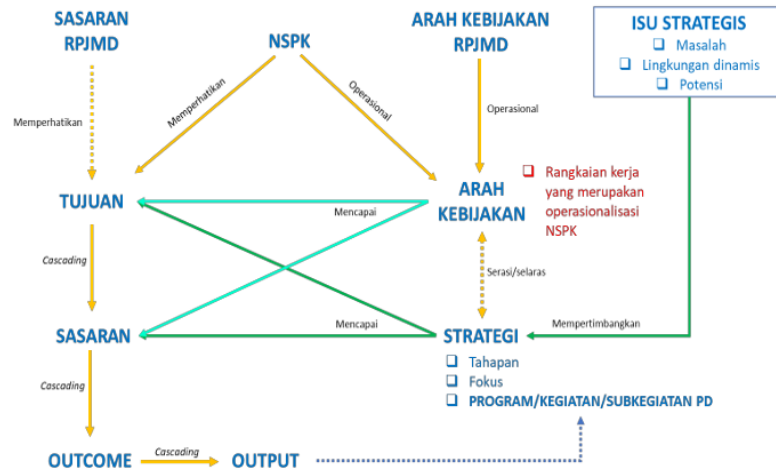


Sasaran Renstra Kapanewon Girisubo Tahun 2025 – 2029 adalah kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon meningkat, yang meliputi :

1. Dokumen perencanaan yang berkualitas.
2. Dokumen keuangan yang berkualitas.
3. Kesejahteraan sosial meningkat.
4. Ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif
5. Pelayanan umum yang berkualitas.

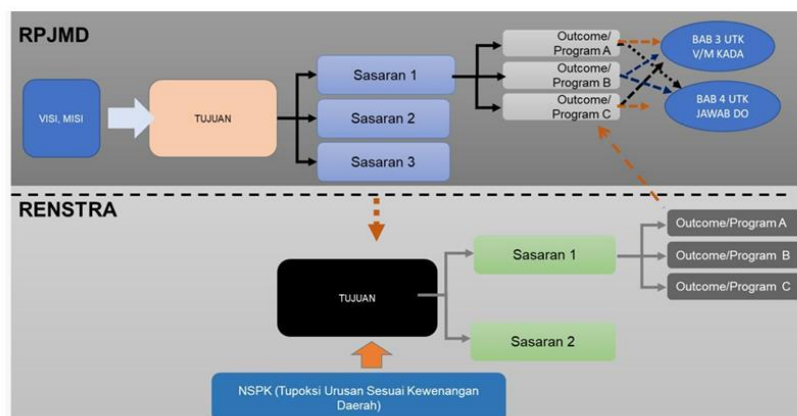
Gambar 3.1

Konsep Renstra Kapanewon Girisubo



Gambar 3.2

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra



Tabel 3.1

## Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Girisubo

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kapanewon Girisubo</b>											
- Terwujudnya Sistem Penyelenggara Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas		Indeks Pelayanan Kapanewon (Indeks)	96.30	96.40	96.50	96.60	96.70	96.80	96.90	
		Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan pembangunan di kalurahan	Persentase Penyusunan RPKal Benar dan Tepat Waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat	100	100	100	100	100	100	100	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
			Waktu (%)								
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase Kegiatan Sosial (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	81.50	82.00	82.50	83.00	83.50	84.00	84.50	

### 3.3. Strategi Kapanewon Girisubo dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif, memuat langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan untuk menghadapi dinamika lingkungan strategis. Strategi ini mencakup optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta penetapan program, kegiatan, dan subkegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 3.3

#### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Visi Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 – 2029 adalah “Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban”.

Misi Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Yang Berkualitas	Meningkatnya Efektivitas Peran Kapanewon Dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan di Kalurahan	Meningkatkan Peran dan Fungsi Kapanewon	Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM dan Meningkatkan sarana dan prasarana di Kapanewon
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kapanewon	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat di Kapanewon	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Kapanewon
		Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kapanewon	Meningkatkan kesejahteraan Sosial	Meningkatkan kualitas layanan publik di kapanewon
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial			

Penahapan pembangunan yang dimaksud merupakan prioritas pembangunan tahunan yang disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Adapun penahapan Renstra Kapanewon Girisubo adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

## Penahapan Renstra Kapanewon Girisubo

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
<b>Penguatan</b> Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	<b>Percepatan</b> Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	<b>Peningkatan</b> Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	<b>Optimalisasi</b> Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	<b>Pemantapan</b> Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas

### 3.4. Arah Kebijakan Kapanewon Girisubo dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Girisubo Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra Kapanewon Girisubo Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Girisubo dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Rumusan Arah Kebijakan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5

## Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kapanewon Girisubo

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan <b>fungsi koordinasi</b> penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial di Kapanewon	
		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan	Meningkatkan <b>peran serta masyarakat</b> dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Kapaneown	
		Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi sarana dan prasarana pendukung	Memperkuat fungsi <b>kelembagaan</b> , peningkatan kapasitas <b>SDM</b> dan Meningkatkan <b>sarana dan prasarana</b> di Kapanewon	
		Mengembangkan sistem pemantauan dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan	Meningkatkan <b>kesiapsiagaan</b> terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana	

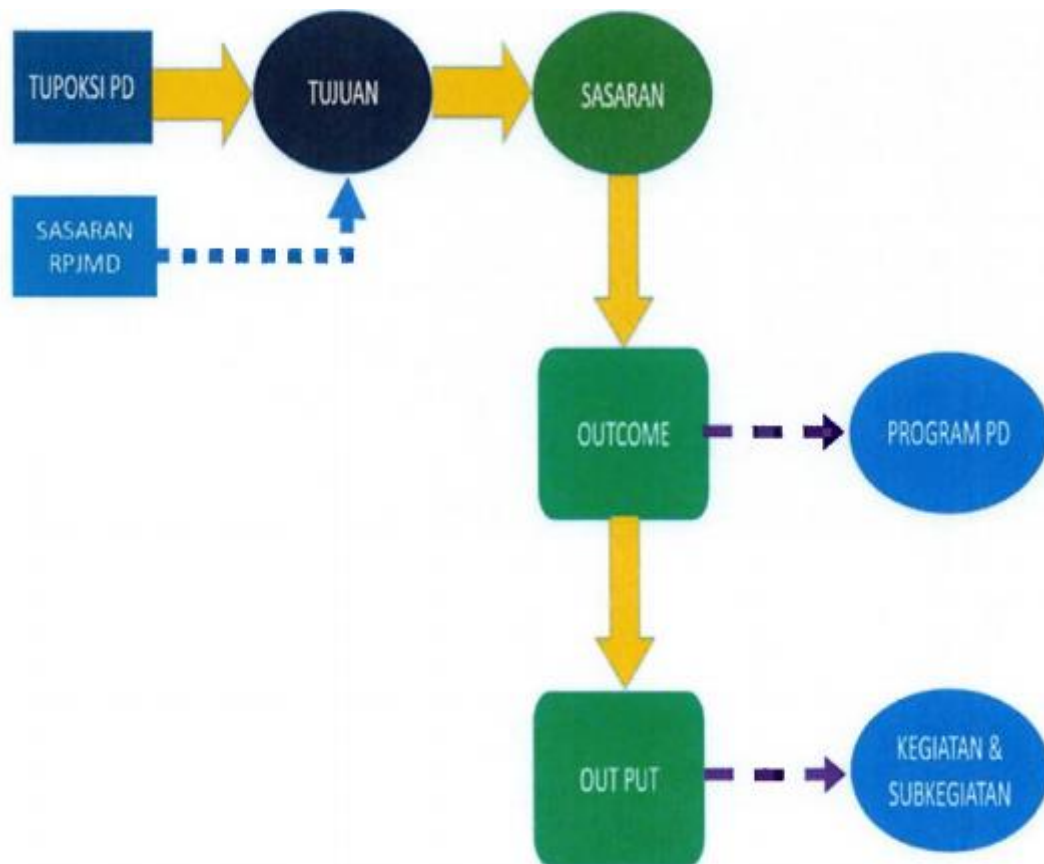
**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA**  
**PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN**

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Tahun 2025–2029 disusun dengan pendekatan berbasis kinerja yang menggambarkan hubungan logis antara tugas dan fungsi (tupoksi), tujuan, sasaran, dan keluaran yang ingin dicapai. Kerangka ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh rencana kerja Kapanewon dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar proses perumusan terdiri dari tahapan sebagai berikut:

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Tahapan perumusan dimulai dari identifikasi tupoksi Kapanewon serta sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD yang kemudian dijabarkan ke dalam tujuan Kapanewon. Tujuan ini menggambarkan arah strategis lima tahunan yang ingin dicapai oleh Kapanewon dalam menjalankan fungsi kewilayahan, pemerintahan umum, fasilitasi pembangunan kalurahan, serta koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat bawah.

Selanjutnya, tujuan tersebut diturunkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan operasional, yang kemudian dikaitkan dengan outcome sebagai hasil jangka menengah dari program yang akan dilaksanakan. Outcome menjadi dasar penyusunan program Kapanewon, yang menggambarkan kebijakan teknis atau intervensi utama dalam menjawab isu strategis di wilayah. Outcome kemudian diturunkan lagi menjadi output, yaitu hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan. Output inilah yang menjadi dasar perumusan kegiatan dan sub kegiatan, yang dijabarkan secara teknis dan mendetail, sesuai dengan nomenklatur nasional dan memperhatikan efektivitas pencapaian hasil. Dengan pendekatan ini, seluruh rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disusun untuk mendukung capaian kinerja strategis Kapanewon secara terukur, efisien, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat wilayah.

Teknik Merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kapanewon Girisubo disajikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1.  
Teknis Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)		
<b>7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kapanewon Girisubo</b>									
- Terwujudnya Sistem Penyelenggara Pemerintahan Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan			Indeks Pelayanan Kapanewon (Indeks)				
					Persentase Penyusunan RPKal Benar dan Tepat Waktu (%)				
		Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Girisubo				Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu (%)			
						Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		
						Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
						Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan		
Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan				Persentase Desa/Kalurahan yang Difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				



<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi  Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi  Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi  Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi  Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi  Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi  Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi  Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial			Persentase Kegiatan Sosial (%)		
			Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat dalam rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Girisubo		Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	
				Adat, tradisi, seni, dan lembaga budaya yang dilestarikan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
					Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan		Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya ketentrannya dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon			Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)		
			Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan		Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
			Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Koordinasi Ketentrannya dan Ketertiban Umum (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Laporan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
						Indonesia	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon			Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	



<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon		Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

Tabel 4.2  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kapanewon Girisubo  
Kabupaten Gunungkidul

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat dalam rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Girisubo	Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kapanewon Girisubo	
2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Adat, tradisi, seni, dan lembaga budaya yang dilestarikan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Girisubo	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	100	100	40.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kapanewon Girisubo	
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan	4	3	40.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)														
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				40.000.000		30.000.000			30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4	3	40.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000			
7.01 - KECAMATAN				2.197.224.213		2.287.530.128			2.313.017.929		2.379.044.516		2.389.041.886		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.214.689.313		1.289.493.928			1.314.931.729		1.381.008.316		1.390.855.686		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	81,99	82,1	1.214.689.313	82,2	1.289.493.928	82,3	1.314.931.729	82,4	1.381.008.316	82,5	1.390.855.686	7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kapanewon Girisubo		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				70.630.000		70.680.000			70.680.000		70.680.000		71.180.000		
Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3	2	70.630.000	2	70.680.000	2	70.680.000	2	70.680.000	2	71.180.000			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	2		2		2		2		2				
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	17		17		17		17		17				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		3			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				64.920.000		64.920.000		64.920.000		64.920.000		65.420.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	64.920.000	2	64.920.000	2	64.920.000	2	64.920.000	3	65.420.000		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				550.000		600.000		600.000		600.000		600.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	550.000	1	600.000	1	600.000	1	600.000	1	600.000		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				550.000		550.000		550.000		550.000		550.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	550.000	1	550.000	1	550.000	1	550.000	1	550.000		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				670.000		670.000		670.000		670.000		670.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3	2	670.000	2	670.000	2	670.000	2	670.000	2	670.000		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				670.000		670.000		670.000		670.000		670.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	670.000	2	670.000	2	670.000	2	670.000	2	670.000		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.820.000		1.820.000		1.820.000		1.820.000		1.820.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	17	1.820.000	17	1.820.000	17	1.820.000	17	1.820.000	17	1.820.000		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.450.000		1.450.000		1.450.000		1.450.000		1.450.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	2	1.450.000	2	1.450.000	2	1.450.000	2	1.450.000	2	1.450.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				978.718.673		979.800.006		979.800.006		957.377.006		964.977.006		
Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	13	13	978.718.673	13	979.800.006	13	979.800.006	13	957.377.006	13	964.977.006		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224	140		140		140		140		140			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	(Orang/bulan)														
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1				
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				971.550.303		972.629.136		972.579.136		950.106.136		957.656.136			
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	224	140	971.550.303	140	972.629.136	140	972.579.136	140	950.106.136	140	957.656.136			
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.397.500		1.400.000		1.450.000		1.500.000		1.550.000			
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1.397.500	1	1.400.000	1	1.450.000	1	1.500.000	1	1.550.000			
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5.770.870		5.770.870		5.770.870		5.770.870		5.770.870			
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	13	13	5.770.870	13	5.770.870	13	5.770.870	13	5.770.870	13	5.770.870			
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2.735.000		2.735.000		2.735.000		2.735.000		2.735.000			
Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	2.735.000	1	2.735.000	1	2.735.000	1	2.735.000	1	2.735.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.735.000		2.735.000		2.735.000		2.735.000		2.735.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	2.735.000	1	2.735.000	1	2.735.000	1	2.735.000	1	2.735.000		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				6.217.000		6.217.000		6.217.000		6.217.000		6.217.000		
Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	6	6.217.000	6	6.217.000	6	6.217.000	6	6.217.000	6	6.217.000		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6.217.000		6.217.000		6.217.000		6.217.000		6.217.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	6	6.217.000	6	6.217.000	6	6.217.000	6	6.217.000	6	6.217.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				59.842.000		101.615.281,15		71.776.000		52.576.000		146.000.039,21		
Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	6	59.842.000	6	101.615.281,15	6	71.776.000	6	52.576.000	6	146.000.039,21		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	14		14		14		14		14			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	13		12		14		12		12			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.322.000		3.422.000		3.522.000		3.622.000		3.722.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	4	3.322.000	4	3.422.000	4	3.522.000	4	3.622.000	4	3.722.000		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.766.000		71.639.281,15		40.900.000		21.000.000		113.724.039,21		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	13	30.766.000	12	71.639.281,15	14	40.900.000	12	21.000.000	12	113.724.039,21		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.860.000		4.060.000		4.260.000		4.460.000		4.660.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	3.860.000	4	4.060.000	4	4.260.000	4	4.460.000	4	4.660.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.554.000		4.754.000		4.954.000		5.154.000		5.354.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	6	4.554.000	6	4.754.000	6	4.954.000	6	5.154.000	6	5.354.000		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				2.800.000		3.000.000		3.200.000		3.400.000		3.600.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	2.800.000	12	3.000.000	12	3.200.000	12	3.400.000	12	3.600.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14.540.000		14.740.000		14.940.000		14.940.000		14.940.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	14	14.540.000	14	14.740.000	14	14.940.000	14	14.940.000	14	14.940.000		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		31.300.000,85		86.377.083		193.876.670		102.000.000,79		
Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	0	0	0	0	31.300.000,85	50	86.377.083	0	193.876.670	0	102.000.000,79		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Disediakan (Unit)														
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0		0		20		0		0				
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		31.300.000,85		56.377.083		53.149.999,37		102.000.000,79			
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	31.300.000,85	20	56.377.083	0	53.149.999,37	0	102.000.000,79			
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		30.000.000		140.726.670,63		0			
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	50	30.000.000	0	140.726.670,63	0	0			
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				43.966.640		43.966.640		43.966.640		43.966.640		43.966.640			
Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	36	43.966.640	36	43.966.640	36	43.966.640	36	43.966.640	36	43.966.640			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	4		4		4		4		4				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12		12		12		12		12				
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.270.000		2.270.000		2.270.000		2.270.000		2.270.000			
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	4	2.270.000	4	2.270.000	4	2.270.000	4	2.270.000	4	2.270.000			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				29.696.640		29.696.640		29.696.640		29.696.640		29.696.640			
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	36	29.696.640	36	29.696.640	36	29.696.640	36	29.696.640	36	29.696.640			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				52.580.000		53.180.000		53.380.000		53.580.000		53.780.000		
Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	120	52.580.000	120	53.180.000	120	53.380.000	120	53.580.000	120	53.780.000		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	11		12		12		12		12			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	1		1		1		1		1			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	30	35		35		35		35		35			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	10		10		10		10		10			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				38.500.000		38.600.000		38.700.000		38.800.000		38.900.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	120	38.500.000	120	38.600.000	120	38.700.000	120	38.800.000	120	38.900.000		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				2.800.000		3.000.000		3.100.000		3.200.000		3.300.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	30	35	2.800.000	35	3.000.000	35	3.100.000	35	3.200.000	35	3.300.000		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.600.000		3.900.000		3.900.000		3.900.000		3.900.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	11	3.600.000	12	3.900.000	12	3.900.000	12	3.900.000	12	3.900.000		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				4.680.000		4.680.000		4.680.000		4.680.000		4.680.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	1	4.680.000	1	4.680.000	1	4.680.000	1	4.680.000	1	4.680.000		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	10	3.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				10.490.000		10.490.000		10.490.000		10.490.000		10.490.000		
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	100	100	10.490.000	100	10.490.000	100	10.490.000	100	10.490.000	100	10.490.000	7.01.0.00.0.00.16.000 - Kapanewon Girisubo	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				10.490.000		10.490.000		10.490.000		10.490.000		10.490.000		
Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	10.490.000	12	10.490.000	12	10.490.000	12	10.490.000	12	10.490.000		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				10.490.000		10.490.000		10.490.000		10.490.000		10.490.000		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	10.490.000	12	10.490.000	12	10.490.000	12	10.490.000	12	10.490.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				372.765.000		382.527.500		382.527.500		382.527.500		382.627.500		
Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	100	100	3.787.500	100	3.887.500	100	3.987.500	100	4.087.500	100	4.287.500	7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kapanewon GiriSubo	
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				3.787.500		3.887.500		3.987.500		4.087.500		4.287.500		
Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	1	30	3.787.500	30	3.887.500	30	3.987.500	30	4.087.500	30	4.287.500		
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				3.787.500		3.887.500		3.987.500		4.087.500		4.287.500		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	1	30	3.787.500	30	3.887.500	30	3.987.500	30	4.087.500	30	4.287.500		
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	100	100	329.080.000	100	336.742.500	100	334.642.500	100	332.542.500	100	330.442.500		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				329.080.000		336.742.500		334.642.500		332.542.500		330.442.500		
Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	29	12	329.080.000	12	336.742.500	12	334.642.500	12	332.542.500	12	330.442.500		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				329.080.000		336.742.500		334.642.500		332.542.500		330.442.500		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	29	12	329.080.000	12	336.742.500	12	334.642.500	12	332.542.500	12	330.442.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	Persentase Desa/Kalurahan yang Difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (%)	100	100	39.897.500	100	41.897.500	100	43.897.500	100	45.897.500	100	47.897.500		
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				32.625.000		34.125.000		35.625.000		37.125.000		38.625.000		
Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	11	2	32.625.000	2	34.125.000	2	35.625.000	2	37.125.000	2	38.625.000		
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	5	13		13		13		13		13			
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				22.700.000		23.700.000		24.700.000		25.700.000		26.700.000		
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	5	13	22.700.000	13	23.700.000	13	24.700.000	13	25.700.000	13	26.700.000		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				9.925.000		10.425.000		10.925.000		11.425.000		11.925.000		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	11	2	9.925.000	2	10.425.000	2	10.925.000	2	11.425.000	2	11.925.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Kecamatan (Laporan)														
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				7.272.500		7.772.500		8.272.500		8.772.500		9.272.500			
Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	2	2	7.272.500	2	7.772.500	2	8.272.500	2	8.772.500	2	9.272.500			
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				7.272.500		7.772.500		8.272.500		8.772.500		9.272.500			
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	2	2	7.272.500	2	7.772.500	2	8.272.500	2	8.772.500	2	9.272.500			
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				443.016.500		443.016.500		443.016.500		443.016.500		443.016.500			
Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	443.016.500	100	443.016.500	100	443.016.500	100	443.016.500	100	443.016.500	7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kapanewon Girisubo		
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				443.016.500		443.016.500		443.016.500		443.016.500		443.016.500			
Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	443.016.500	2	443.016.500	2	443.016.500	2	443.016.500	2	443.016.500			
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				443.016.500		443.016.500		443.016.500		443.016.500		443.016.500			
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	443.016.500	2	443.016.500	2	443.016.500	2	443.016.500	2	443.016.500			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				96.283.400		102.087.200		102.087.200		102.087.200		102.087.200		
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	96.283.400	100	102.087.200	100	102.087.200	100	102.087.200	100	102.087.200	7.01.0.00.0.00.16.000 - Kapanewon Girisubo	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				96.283.400		102.087.200		102.087.200		102.087.200		102.087.200		
Laporan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	75	75	96.283.400	75	102.087.200	75	102.087.200	75	102.087.200	75	102.087.200		
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	2	5		5		5		5		5			
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				88.058.400		93.087.200		93.087.200		93.087.200		93.087.200		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	75	75	88.058.400	75	93.087.200	75	93.087.200	75	93.087.200	75	93.087.200		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				8.225.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	2	5	8.225.000	5	9.000.000	5	9.000.000	5	9.000.000	5	9.000.000		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				59.980.000		59.915.000		59.965.000		59.915.000		59.965.000		
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	59.980.000	100	59.915.000	100	59.965.000	100	59.915.000	100	59.965.000	7.01.0.00.0.00.16.000 - Kapanewon Girisubo	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				59.980.000		59.915.000		59.965.000		59.915.000		59.965.000		
Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	18	16	59.980.000	16	59.915.000	16	59.965.000	16	59.915.000	16	59.965.000		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	1	8		8		8		8		8			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	12	35		35		35		35		35			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	0		1		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	8	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1.675.000		1.675.000		1.675.000		1.675.000		1.675.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	1	8	1.675.000	8	1.675.000	8	1.675.000	8	1.675.000	8	1.675.000		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				32.030.000		31.030.000		32.030.000		32.030.000		32.030.000		
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	18	16	32.030.000	16	31.030.000	16	32.030.000	16	32.030.000	16	32.030.000		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				20.400.000		20.000.000		20.900.000		21.000.000		20.900.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	12	35	20.400.000	35	20.000.000	35	20.900.000	35	21.000.000	35	20.900.000		
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1.675.000		1.575.000		1.475.000		1.575.000		1.475.000		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	2	1	1.675.000	1	1.575.000	1	1.475.000	1	1.575.000	1	1.475.000		
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0		2.000.000		0		0		0		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	0	0	1	2.000.000	0	0	0	0	0	0		
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				2.525.000		2.325.000		2.125.000		2.325.000		2.125.000		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	8	1	2.525.000	1	2.325.000	1	2.125.000	1	2.325.000	1	2.125.000		
7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1.675.000		1.310.000		1.760.000		1.310.000		1.760.000		
Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	0	1	1.675.000	1	1.310.000	1	1.760.000	1	1.310.000	1	1.760.000		



Sebagaimana telah diungkapkan di depan, bahwa penentuan program dan kegiatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah haruslah mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga, kondisi umum wilayah yang ada sekarang maupun proyeksi ke masa depan, Visi dan Misi, berikut tujuan dan sasarannya, dan tidak kalah pentingnya faktor strategi dan kebijakan yang diambil dalam menentukan prioritas program dan kegiatan.

Hal hal yang menjadi prioritas dan titik tekan dari program dan kegiatan di SKPD Kapanewon Girisubo diupayakan untuk selaras dengan Visi dan Misi Bupati selaku Kepala daerah yang telah dielaborasi menjadi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul 2025 - 2029.

Acuan ini penting agar pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan dapat lebih terarah, terinci dan terukur, untuk itulah perlu juga dibuat matrik rencana program pembangunan dan indikasi kegiatan. Matrik tersebut memuat komponen kebijakan, program indikasi program dan indikasi kegiatan berdasarkan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan strategi pembangunan.

Matriks tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Kapanewon Girisubo dalam menyusun rencana kerja bagi satuan kerja kapanewon dan untuk lebih memudahkan dalam pembagian alur kerja maka, matrik berikut akan dibagi menjadi 3 bagian besar yakni program SKPD, Program lintas SKPD, program kewilayahan.

Sedangkan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung program Prioritas Pembangunan tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.3  
Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kapanewon Girisubo</b>				
1.	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat dalam rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Girisubo	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya  2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
2.	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Girisubo	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	A URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			
			4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
3.	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
			7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	



<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi	
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
			7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
			7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
4.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
5.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan	

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
		Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
6.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
7.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
8.	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi  Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
			7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
			7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
			7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	

Perumusan indikator kinerja pada Kapanewon merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirancang dapat diukur capaian dan dampaknya secara obyektif dan terarah. Indikator kinerja digunakan sebagai alat ukur dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kapanewon, serta kontribusinya dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota Tahun 2025–2029.

Indikator kinerja dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). IKU digunakan untuk mengukur capaian sasaran strategis Kapanewon yang bersifat jangka menengah dan berdampak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan kewilayahan. Sedangkan IKK digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan secara teknis, serta efektivitas pemanfaatan sumber daya.

Dalam proses perumusannya memiliki keterkaitan yang erat dan logis dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Tujuan menggambarkan arah strategis yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sedangkan sasaran merupakan penjabaran yang lebih spesifik dan terukur dari tujuan tersebut. Dalam konteks ini, indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana sasaran tersebut dapat dicapai secara obyektif dan konsisten, Sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 4.4  
Indikator Kinerja Utama Kapanewon Girisubo

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.	7.01.0.00.0.00.1 6.0000 - Kapanewon Girisubo								
2.	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	96,4	96,5	96,6	96,7	96,8	96,9	
3.	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Kegiatan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase Koordinasi	%	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82	82,5	83	83,5	84	84,5	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tingkat Kapanewon tidak dicantumkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) karena IKK secara formal hanya terdapat dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). RENSTRA Kapanewon lebih fokus pada tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang mendukung visi dan misi daerah, sedangkan pengukuran kinerja melalui IKK merupakan bagian dari pelaporan kinerja yang dituangkan dalam LPPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Konsekuensi dari hal tersebut adalah bahwa seluruh rencana strategis yang dibuat oleh Kapanewon Girisubo harus mengacu kepada dokumen tersebut sebagai wujud nyata komitmen dan dukungan terhadap upaya pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan daerah yang termaktub didalamnya.

Hal ini menjadi sangat penting mengingat keterpaduan, sinkronisasi, harmonisasi dan sinergitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan akan menentukan kualitas keberhasilan yang akan dicapai. Dengan disusunnya rencana strategis juga akan dapat diketahui peran dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan dalam upaya pelaksanaan program dan kegiatan sesuai distribusi kewenangan yang diberikan, sehingga dapat mengeliminir terjadinya anggaran ganda, tumpang tindih, kegiatan dan duplikasi program kegiatan.

Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Strategis Kapanewon Girisubo Tahun 2025-2029 ini, semoga dapat memberikan panduan kepada seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat mengoptimalkan segala daya yang ada guna keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai demi terwujudnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

PANEWU,

EDY SEDONO

---

BUPATI GUNUNGKIDUL

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH





